

**IMPLEMENTASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)**

(Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Starata Satu (S1)
Jurusan Ilmu Pemerintahan

Diajukan Kepada:
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA



Oleh:
WILLIAM DANIEL HOKADA
NIM. 223020703107

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

(Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya)

Disusun oleh:

William Daniel Hokada

NIM. 223020703107

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing:

Pembimbing Utama



Dr. M. Doddy Syahirul Alam, SE., M.Si

NIP. 198008222008011008

Tanggal: 25 Maret 2026

Pembimbing Pendamping



Ahmad Robi Ul'zikri, M.I.P.

NIP. 199707162024061001

Tanggal: 7 April 2026

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Disusun oleh :
William Daniel Hokada
NIM. 223020703107

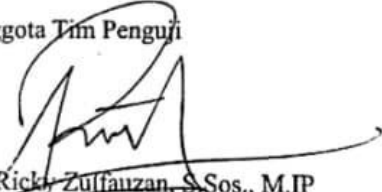
Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam Ujian Sidang Skripsi
Pada tanggal 28 April 2026

Tim Penguji :

Ketua Tim Penguji


Dr. M. Doddy Syahirul Alam, SE., M.Si
NIP. 198008222008011008
Tanggal: 28 April 2026

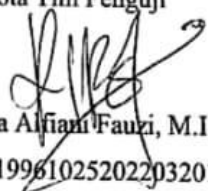
Anggota Tim Penguji


Dr. Ricky Zulfauzan, S.Sos., M.IP
NIP. 198407062008121002
Tanggal: 28 April 2026

Sekretaris Tim Penguji


Ahmad Robi Ul'zikri, M.I.P.
NIP. 199707162024061001
Tanggal: 28 April 2026

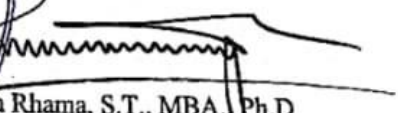
Anggota Tim Penguji


Erinda Alfiani Fauzi, M.I.P.
NIP. 199610252022032011
Tanggal: 28 April 2026

Palangka Raya, Mei 2026

Mengetahui :
Dekan,




Rhamu Rhama, S.T., MBA., Ph.D
NIP. 197901052010121001

HALAMAN ORISINALITAS SKRIPSI

William Daniel Hokada

NIM. 223020703107

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul “IMPLEMENTASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA” adalah betul – betul karya sendiri. Hal – hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Palangka Raya, 28 April 2026

Yang membuat pernyataan



William Daniel Hokada

NIM. 223020703107

HALAMAN PERUNTUKAN

Disajikan sebagai karya nonfiksi dan didedikasikan untuk tak seorang pun.

ABSTRAK

William Daniel Hokada, NIM. 223020703107, Program Sarjana, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya, 2026. Implementasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Tim Pembimbing Dr. M. Doddy Syahirul Alam, S.E., M.SI dan Ahmad Robi Ul'zikri, M.I.P.

Upaya pemerintah untuk menyediakan tata kelola yang transparan dan efisien dengan penekanan pada pelayanan publik berkualitas tinggi dikenal sebagai reformasi birokrasi. Menurut PermenPAN-RB Nomor 90 Tahun 2021, pembentukan Zona Integritas dengan tujuan mewujudkan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) merupakan instrumen penting untuk perubahan birokrasi. Untuk mencapai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, penelitian ini berupaya memahami bagaimana Zona Integritas diimplementasikan. Model interaktif yang dibuat oleh Miles dan Huberman digunakan untuk menganalisis data. Empat komponen model implementasi kebijakan Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi adalah teori yang diterapkan.

Menurut temuan studi, implementasi Zona Integritas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya berjalan cukup baik dalam hal enam komponen penggerak Manajemen Perubahan, Pengaturan Tata Kelola, Pengaturan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Menurut pendekatan Edward III, komunikasi dilakukan melalui penggunaan media cetak dan digital, sosialisasi selama absensi pagi, dan pemantauan serta evaluasi rutin. Pembentukan Tim Zona Integritas dengan SOP yang terdefinisi dengan baik telah membuat dimensi struktur birokrasi terorganisir dengan baik. Pemanfaatan sistem layanan online SI-DOI dan komitmen anggota staf untuk menawarkan pelayanan yang cepat dan responsif kepada masyarakat merupakan faktor yang mendorong implementasi. Keterbatasan anggaran yang menghambat pengembangan SDM yang komprehensif dan pengenalan perubahan internal yang tidak terduga yang meningkatkan beban kerja karyawan merupakan faktor penghambat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Zona Integritas, Reformasi Birokrasi.

ABSTRACT

William Daniel Hokada, Student ID Number. 223020703107, Undergraduate Program, Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, University of Palangka Raya, 2026. Implementation of Integrity Zone Towards Corruption-Free Region (WBK) and Clean and Serving Bureaucratic Region (WBBM) Study at the Population and Civil Registration Office of Palangka Raya City. Advisory Team: Dr. M. Doddy Syahirul Alam, S.E., M.SI and Ahmad Robi Ul'zikri, M.I.P.

The government's efforts to provide transparent and efficient governance with an emphasis on high-quality public services are known as bureaucratic reform. According to Ministerial Regulation Number 90 of 2021 on Administrative and Bureaucratic Reform, the establishment of Integrity Zones with the aim of realizing Corruption-Free Areas and Clean and Serving Bureaucracy Areas is a crucial instrument for bureaucratic change. To achieve the Corruption-Free Areas and Clean and Serving Bureaucracy Areas at the Palangka Raya City Population and Civil Registration Office, this study seeks to understand how the Integrity Zones are implemented. An interactive model created by Miles and Huberman was used to analyze the data. The four components of the Edward III policy implementation model communication, resources, attitudes, and bureaucratic structure are the theories applied.

According to the study findings, the implementation of the Integrity Zone at the Population and Civil Registration Office of Palangka Raya City has been quite successful in terms of the six driving components: Change Management, Governance Arrangements, Human Resource Management System Arrangements, Strengthening Accountability, Strengthening Supervision, and Improving the Quality of Public Services. According to the Edward III approach, communication is carried out through the use of print and digital media, socialization during morning roll call, and routine monitoring and evaluation. The formation of an Integrity Zone Team with well-defined SOPs has made the dimensions of the bureaucratic structure well-organized. The use of the SI-DOI online service system and the commitment of staff members to offer fast and responsive services to the public are factors that encourage implementation. Budget limitations that hinder comprehensive human resource development and the introduction of unexpected internal changes that increase employee workload are inhibiting factors.

Keywords: Policy Implementation, Integrity Zone, Bureaucratic Reform.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA”** Skripsi ini diselesaikan untuk memenuhi persyaratan gelar sarjana strata satu (S-1) di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Penulis mengakui bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari banyak pihak, skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Kasih dan Karunia-nya sehingga dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini.
2. Bapak Prof. Bhayu Rhama, S.T., MBA., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya.
3. Bapak Dr. Anyualatha Haridison, M.Si, selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya.
4. Bapak Dr. M. Doddy Syahirul Alam, S.E., M.Si, selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya.

5. Ibu Ester Sonya Ulfaritha Lapalu, M. Si, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Bapak Bismar Harris Satriawan, S.IP., M.I.P. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
7. Bapak Dr. Ricky Zulfauzan, S.Sos., M.IP. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
8. Ibu Ahmad Robi Ul'zikri, M.I.P. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pembelajaran dan juga bimbingan dalam penyusunan skripsi.
9. Ibu Erinda Alfiani Fauzi, M.I.P. selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan pembelajaran dan juga kritik dan saran dalam penyusunan skripsi.
10. Bapak/ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran yang sangat bermanfaat selama menempuh pendidikan di Universitas Palangka Raya.
11. Keluargaku tersayang, kepada mamaku dan papaku tersayang, dan abangku, terimakasih selalu ada dan sabar dalam memberi kekuatan baik secara moral dan materil. Doa tulus kalian selalu menyertaiku. Tidak ada kata yang bisa mendeskripsikan besarnya dukungan kalian.

12. Rekan-rekan terbaik penulis, Angel Gea, Nanda Manao, Marcelino yang telah memberikan semangat, motivasi, diskusi berharga selama proses penyusunan proposal skripsi ini.

13. Paguyuban 8 Serangkai, Christian, Daffa, Balinga, Restu, Rifael, Elisha, Perbi, yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari betapa banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif sangat dihargai untuk perbaikan di masa mendatang. Diharapkan skripsi ini dapat membantu pihak yang membutuhkan.

Palangka Raya, 28 April 2026

Penulis

William Daniel Hokada

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN PERUNTUKAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15

2.1 Kebijakan Publik.....	15
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	15
2.1.2 Jenis Kebijakan	16
2.1.3 Proses Kebijakan Publik	18
2.2 Implementasi Kebijakan.....	23
2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan	23
2.2.2 Model-Model Implementasi.....	24
2.2.3 Pendekatan Implementasi.....	28
2.3 Konsep Zona Integritas	31
2.4 Konsep Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	32
2.5 Penelitian Terdahulu	33
2.6 Kerangka Pemikiran.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Lokasi Penelitian.....	39
3.3 Waktu Penelitian	39
3.4 Fokus Penelitian	40
3.5 Pemilihan Informan.....	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data	42

3.7 Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	46
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	46
4.2 Hasil Penelitian	50
4.2.1 Manajemen Perubahan	51
4.2.2 Penataan Tata Laksana	56
4.2.3 Penataan Sistem Manajemen SDM.....	61
4.2.4 Penguatan Akuntabilitas.....	66
4.2.5 Penguatan Pengawasan	68
4.2.6 Peningkatan Kualitas Pelayanan	72
BAB V PEMBAHASAN	77
5.1 Proses Implementasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	77
5.1.1 Komunikasi	83
5.1.2 Sumber Daya.....	85
5.1.3 Disposisi.....	86
5.1.4 Struktur Birokrasi.....	86

5.2 Pendukung Dan Penghambat Implementasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	87
BAB VI PENUTUP	89
5.3 Kesimpulan	89
5.4 Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Bobot Komponen Pengungkit.....	4
Tabel 1. 2 Bobot Komponen Hasil.....	4
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3. 1 Informan Peneliti.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Website SI-DOI dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.....	6
Gambar 1. 2 Foto Loker Prioritas Bagi Kelompok Rentan.....	7
Gambar 1. 3 Akun Instagram Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.....	8
Gambar 1. 4 Unggahan Terakhir di akun Instagram Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	9
Gambar 1. 5 Akun Instagram Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.....	10
Gambar 1. 6 Unggahan Terakhir di akun Instagram Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	10
Gambar 2. 1 Tahap kebijakan publik menurut William N. Dunn (1994)	20
Gambar 2. 2 Tahapan kebijakan publik menurut Ripley (1985).....	21
Gambar 2. 3 Teori Pendekatan Implementasi	31
Gambar 2. 4 Kerangka Pemikiran.....	37
Gambar 3. 1 Komponen analisis data menurut Miles and Huberman	44
Gambar 4. 1 Foto Kantor Disdukcapil Kota Palangka Raya	46
Gambar 4. 2 Visi dan Misi Disdukcapil Kota Palangka Raya	48
Gambar 4. 3 Motto Pelayanan Disdukcapil Kota Palangka Raya.....	49
Gambar 4. 4 Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.....	50

Gambar 4. 5 Struktur organisasi Tim Zona Integritas Disdukcapil Kota Palangka Raya.....	53
Gambar 4. 6 Tampilan website Disdukcapil Kota Palangka Raya	60
Gambar 4. 7 ANJAB dan ABK Kepala Dinas Disdukcapil Palangka Raya	62
Gambar 4. 8 RENSTRA Disdukcapil Kota Palangka Raya.....	67
Gambar 4. 9 RENJA Disdukcapil Kota Palangka Raya	67
Gambar 4. 10 Himbauan Keluhan/Pengaduan Pelayanan Adminduk Disdukcapil Kota Palangka Raya	70
Gambar 4. 11 SOP Alur Pengaduan.....	70
Gambar 4. 12 Tabel IKM Disdukcapil Kota Palangka Raya	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	PEDOMAN WAWANCARA PEGAWAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA.....	96
Lampiran 2	PEDOMAN WAWANCARA MASYARAKAT	102
Lampiran 3	TRANSKRIP WAWANCARA PEGAWAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA.....	108
Lampiran 4	TRANSKRIP WAWANCARA MASYARAKAT	142
Lampiran 5	TRANSKRIP OBSERVASI.....	163
Lampiran 6	FOTO PENELITIAN	167
Lampiran 7	SURAT IZIN PENELITIAN DARI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PALANGKA RAYA	170
Lampiran 8	SURAT KETERANGAN PENELITIAN DARI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA.....	171
Lampiran 9	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2010 TENTANG GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010-2025.....	172
Lampiran 10	PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN DAN	

EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI INSTANSI PEMERINTAH	173
Lampiran 11 PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020-2024.....	174
Lampiran 12 PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA.....	175
Lampiran 13 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 470/225/DKPS/V/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA.....	176
Lampiran 14 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 800/11.2/DKPS/I/2025 TENTANG KEBIJAKAN BUDAYA 5S (SENYUM, SALAM, SAPA, SOPAN SANTUN, SABAR) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA.....	177

Lampiran 15	KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 700/12.1/DKPS/I/2025 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA.....	178
-------------	---	-----

Lampiran 16	KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 470/407/DKPS/VIII/2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA.....	179
-------------	--	-----

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage.
- Dewi, D. S. K. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik; Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Samudra Biru.
- Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2007). *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*. CRC Press.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Widya Karya Semarang.
- Maulana, D., & Nugroho, A. (2019). *Kebijakan Publik (Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik)*. CV. AA RIZKY.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*. ALFABETA Bandung.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi) Bandung.
- Taufiqurokhman. (2024). *Kebijakan Publik Pendelegasian tanggungjawab negara kepada presiden selaku penyelenggara pemerintahan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Yakin, I. H. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. AKSARA GLOBAL AKADEMIA.

JURNAL DAN ARTIKEL ILMIAH

- Ardenovki, F., Santoso, D., & Yogopriyatno, J. (2024). Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Di Pengadilan Negeri Arga Makmur. *Widyanata*, 21(1), 12–25.
- Candra, V. A., & Prabawati, I. (2025). Implementasi Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Dinas Pemadam Kebakaran Dan

- Penyelamatan Kota Surabaya. *Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*, 7(2), 157–162.
- Fitria M, B., & Khaidir, A. (2023). Implementasi Program Pembangunan Zona Integritas oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bukittinggi Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2674–2681.
- Gafar, T. F., Octavia, S., Zamhasari, Z., & Suryaningsih, S. (2022). Reformasi Birokrasi Dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(10), 2253–2264.
- Hanafi, A. S. (2020). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dengan Pembangunan Zona Integritas Pada Kementerian Perindustrian. *JIKAP (Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran)*, 4(1), 31.
- Handrianto, D., Jumiaty, I. E., & Iqbal, W. M. (2023). Implementasi Pelaksanaan Zona Integritas Pada Perwakilan BKKBN Provinsi Banten. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 7(1), 23–38.
- Kristiono, N., Salam, R., Latifah, H., Astuti, I., Prastiwi, A. A., Firdaus, S. R. Al, & Novita, M. D. (2023). Implementasi Pelaksanaan Zona Integritas pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, 2(4), 163–178.
- Normajatun, N., Fibriyanita, F., & Hamdie, A. N. (2022). Implementasi Kebijakan Pembangunan Zona Integritas Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(2), 89.
- Shoimuna, M. D. (2024). Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik. *Public Service and Governance Journal*, 5(1), 239–257.
- Sirin, A. (2021). Strategi Implementasi Pembangunan Zona Integritas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Edutrained: Jurnal Pendidikan dan Pelatihan*, 5(2), 148–163.
- Winoto, S., & Handayani, M. T. (2022). Penguatan reformasi birokrasi di pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Perspektif Policy Leadership. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 37–52.

PRODUK HUKUM

- Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Nomor 800/11.2/DKPS/I/2025 Tentang Kebijakan Budaya 5S (Senyum,

Salam, Sapa, Sopan Santun, Sabar) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Nomor 470/407/DKPS/VIII/2022 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Nomor 470/225/DKPS/V/2023 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Nomor 700/12.1/DKPS/I/2025 Tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya

Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2020-2024